



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO**



PERJANJIAN KINERJA



Jln. Kejaksaan No. 5 B Sengkang



Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021



<http://bkpsdm.wajokab.go.id>

TAHUN

2019

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas segala karunia, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2019 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan penjabaran atas ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini berisi penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Yang dimaksud dengan Pimpinan Instansi yang lebih tinggi adalah Bupati, Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo dan Pejabat Administrator, yang memberikan penugasan kepada bawahannya masing-masing untuk melaksanakan program/kegiatan. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Demikian dokumen ini kami susun, semoga Allah SWT menganugerahi para pengemban amanah untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Sengkang, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

H. AMIRUDDIN. A, S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730514 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-2
C. Tujuan Penyusunan.....	I-4
D. Gambaran Umum	I-4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2014-2019	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-3
BAB III PENUTUP	III-1
GAMBAR DAN TABEL	
Gambar 1. Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Wajo	I-5
Tabel 1.1. Jumlah PNS Lingkup BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 berdasarkan Tingkat Pendidikan	I-6
Tabel 1.2. Jumlah PNS Lingkup BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 berdasarkan Pangkat	I-6
Tabel 2.1. Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019	II-4

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu menjunjung tinggi akuntabilitas yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Salah satu bentuk penyelenggaraan SAKIP adalah Perjanjian Kinerja yang tersusun atas indikator kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria *spesifik (specific)*, dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau atau dikumpulkan (*trackable*). Perjanjian Kinerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian



Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, yang mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) dan Pimpinan Perangkat Daerah. Olehnya itu, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo (yang selanjutnya dalam dokumen ini disingkat BKPSDM Kabupaten Wajo) menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun tersebut. Dimana pada akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2019 meliputi :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo;
20. Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
21. Keputusan Bupati Wajo Nomor 285 Tahun 2018 tentang Pengesahan Revisi Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

D. Gambaran Umum BKPSDM Kab. Wajo

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah



Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada BKPSDM Kabupaten Wajo diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016.

Tugas BKPSDM Kabupaten Wajo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 adalah *“membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.”* Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM Kabupaten Wajo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

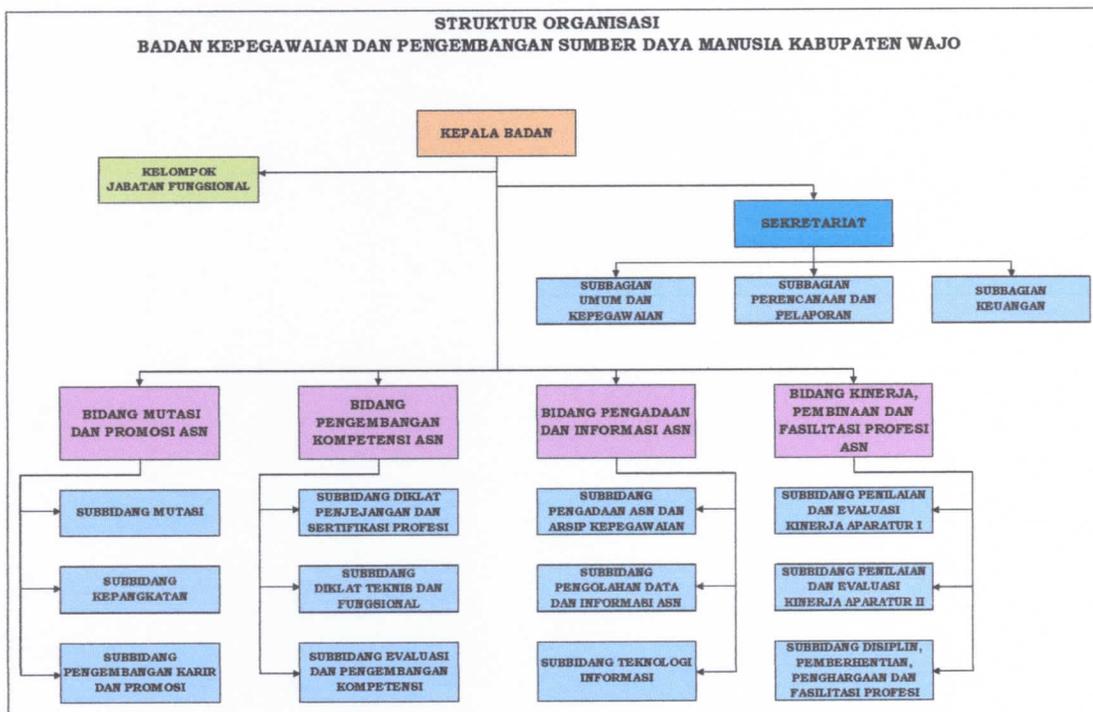
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Gambar 1 menunjukkan susunan organisasi dan tata kerja BKPSDM Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pengadaan dan Informasi ASN
 - a. Subbidang Pengadaan ASN dan Arsip Kepegawaian
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi ASN
 - c. Subbidang Teknologi Informasi
4. Bidang Mutasi dan Promosi ASN



- a. Subbidang Mutasi
 - b. Subbidang Kepangkatan
 - c. Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
- a. Subbidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi Profesi
 - b. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan Kompetensi
6. Bidang Kinerja, Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN
- a. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
 - b. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
 - c. Subbidang Disiplin, Pemberhentian, Penghargaan dan Fasilitasi Profesi ASN
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Wajo

Jumlah PNS pada BKPSDM Kabupaten Wajo sebanyak 38 orang dengan tingkat pendidikan, pangkat dan eselon yang variatif. Pendidikan formal PNS pada BKPSDM Kabupaten Wajo sudah cukup tinggi. Tabel 1.1 menunjukkan dari 38 orang PNS pada BKPSDM Kabupaten Wajo, yang berpendidikan magister (S2) sebanyak 8 orang, kemudian 17 orang yang mempunyai pendidikan terakhir sarjana (S1). Berikutnya terdapat 13 orang telah tamat pendidikan SLTA.



Tabel 1.1.
JUMLAH PNS LINGKUP BKPSDM KABUPATEN WAJO TAHUN 2019
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
	L	P	
S.3	-	-	-
S.2	4	4	8
S.1	4	13	17
D.IV	-	-	-
D.III	-	-	-
D.II	-	-	-
D.I	-	-	-
SLTA	9	4	13
SLTP	-	-	-
TOTAL			38

Tabel 1.2. juga menunjukkan jenjang pangkat PNS pada BKPSDM Kabupaten Wajo. Dari 38 orang PNS pada BKPSDM Kabupaten Wajo, sebanyak satu orang berpangkat Pembina Utama Muda, satu orang berpangkat Pembina Tingkat I, dan empat orang berpangkat Pembina. Adapun PNS yang berpangkat Penata Tingkat I sebanyak tiga orang, pangkat Penata sebanyak 8 orang, Penata Muda Tingkat I sebanyak 6 orang, dan pangkat Penata Muda sebanyak tiga orang. Selanjutnya terdapat tiga orang berpangkat Pengatur, 7 orang berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, dan dua orang berpangkat Pengatur Muda.

Tabel 1.2.
JUMLAH PNS LINGKUP BKPSDM KABUPATEN WAJO TAHUN 2019
BERDASARKAN PANGKAT

PANGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
	L	P	
Pembina Utama	-	-	-
Pembina Utama Madya	-	-	-
Pembina Utama Muda	1	-	1
Pembina Tingkat I	1	-	1
Pembina	2	2	4
Penata Tingkat I	1	2	3
Penata	2	6	8
Penata Muda Tingkat I	1	5	6
Penata Muda	1	2	3
Pengatur Tingkat I	-	-	-
Pengatur	1	2	3
Pengatur Muda Tingkat I	5	2	7
Pengatur Muda	2	-	2
TOTAL			38



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis Tahun 2014-2019

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi *stakeholders* serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka visi BKPSDM Kabupaten Wajo adalah **mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja tinggi**. Visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan BKPSDM Kabupaten Wajo agar berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*) dan mendukung visi Kabupaten Wajo. Terdapat dua hal pokok dalam yang terkandung dalam visi, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan ASN yang berkinerja tinggi. Kedua pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. ASN yang profesional mengandung makna bahwa ASN sebagai penyelenggara negara diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, produktif, kreatif, inovatif, pantang menyerah, dan unggul dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dan sikap/ perilaku sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal Wajo (*Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge*) sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pelayan, pengayom dan motivator bagi masyarakat;
- b. ASN yang berkinerja tinggi mengandung makna bahwa ASN diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi serta mampu merencanakan dan mencapai target-target kerja yang diharapkan melalui budaya kinerja yang berorientasi kepada hasil.

Pernyataan visi tersebut merupakan harapan yang ingin dicapai untuk mewujudkan BKPSDM Kabupaten Wajo sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian di Kabupaten Wajo. Manajemen kepegawaian ini dapat dikerangkakan pada terwujudnya *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas oleh segenap jajaran pemerintah Kabupaten Wajo.

Pencapaian visi dapat dilakukan melalui misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. **Misi pertama** adalah *meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara*, dengan maksud agar ASN untuk memiliki penguasaan bidang tugas pokok dan fungsi dengan mengedepankan prinsip transparansi,



akuntabilitas, tidak diskriminatif, dan pelayanan prima. Penguasaan tugas pokok dan fungsi dibentuk melalui tiga pendekatan, yaitu 1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis/fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis; 2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan; 3) Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman bekerja berkaitan dengan interaksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki kearifan lokal budaya Wajo dan wawasan kebangsaan.

Misi kedua adalah *meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel*, yang menjelaskan bahwa 1) Penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang berbasis kompetensi dan kinerja bertujuan untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara dalam rangka menjamin tewujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NKRI, mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mewujudkan Pegawai ASN yang netral, dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat serta mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja; 3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan kediklatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMpeg); 4) Penguatan kapasitas manajemen dan kelembagaan dilakukan melalui penyediaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran, kesejahteraan ASN, struktur organisasi, standar operasional prosedur, budaya kerja, integritas, dinamika organisasi, sinergitas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup BKPSDM Kabupaten Wajo.



2. Rencana Kerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2014-2019 disusun suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja instansi menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan administrasi pada BKPSDM Kabupaten Wajo dapat berjalan dengan baik. Sasaran strategis tahun 2019, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada Tabel 2.1.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 menetapkan enam sasaran strategis beserta indikator kinerja, yang akan diakomodir melalui enam program dengan anggaran sebesar **Rp.6.930.671.000** (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 (*lihat lampiran*).



Tabel 2.1.
RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp)
Misi 1: Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara					
1.	Terpenuhinya penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi (T.1)	Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (S.1)	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (IS.1)	100%	1,019,510,200
		Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi (S.2)	Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (IS.2)	85%	1,289,131,500
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel					
2.	Terpenuhinya Hak dan Kewajiban aparatur sipil negara secara cepat, tepat dan akurat (T.2)	Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara (S.3)	Persentase tingkat kedisiplinan ASN (IS.3)	100%	750,798,000
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (S.4)	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (IS.4)	90,52	1,958,805,300
		Tersedianya akurasi data kepegawaian (S.5)	Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat (IS.5)	100%	336,380,000
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD (T.3)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (S.6)	Nilai evaluasi kinerja pemerintah (IS.6)	85	26,575,000



BAB III

PENUTUP

BKPSDM Kabupaten Wajo sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan sasaran strategis dengan memuat indikator kinerja dan target kinerja untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang dimaksud.

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat. Kritik dan saran dari pihak terkait sangat diperlukan guna penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya.

Sengkang, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Wajo,

H. AMIRUDDIN A, S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730514 199303 1 005



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2019



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M.**
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. ANDI BURHANUDDIN UNRU**
Jabatan : **BUPATI WAJO**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 30 Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama, 


H. ANDI BURHANUDDIN UNRU


H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19730514 199303 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui Pendidikan dan pelatihan	100%
2	Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi	85%
3	Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	90,52
5	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentasi aparatur sipil negara yang datanya akurat	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi kinerja pemerintah	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.019.510.200	
2	Pembinaan dan pengembangan aparatur	2.039.929.500	
3	Pelayanan administrasi perkantoran	1.838.805.300	
4	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	120.000.000	
	Penataan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)	336.380.000	
5	Perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	26.575.000	

Terbilang: Lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah

Sengkang, 30 Januari 2019

Pihak Kedua


H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Pihak Pertama


H. AMIRUDDIN. A, S.Sos., M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197305141993031005

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIAT

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Angka	90.52	I	89.45
					II	89.85
					III	90.27
					IV	90.52
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	%	90.52	I	89.45
					II	89.85
					III	90.27
					IV	90.52
3	Perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan	Penilaian LAKIP dari Inspektorat	Angka	85	I	-
					II	-
					III	85
					IV	-
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	%	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	I	100
					II	-
					III	-
					IV	-

Sengkang, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris

H. AMRUDDIN A., S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730514 199303 1 005

EDY RAKHMAN, S. Sos., M. Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19720308 199303 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	237,500,000	I	25%	59,375,000
						II	50%	59,375,000
						III	75%	59,375,000
						IV	100%	59,375,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	557,515,300	I	25%	139,378,825
						II	50%	139,378,825
						III	75%	139,378,825
						IV	100%	139,378,825
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	10,000,000	I	25%	2,500,000
						II	50%	2,500,000
						III	75%	2,500,000
						IV	100%	2,500,000
4	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	36,200,000	I	25%	4,250,000
						II	50%	4,250,000
						III	75%	3,000,000
						IV	100%	5,500,000
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	42,200,000	I	25%	10,550,000
						II	50%	10,550,000
						III	75%	10,550,000
						IV	100%	10,550,000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	20,000,000	I	25%	5,000,000
						II	50%	5,000,000
						III	75%	5,000,000
						IV	100%	5,000,000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	15,000,000	I	25%	15,000,000
						II	50%	-
						III	75%	-
						IV	100%	-
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	Bulan	12	480,250,000	I	25%	150,000,000
						II	50%	150,000,000
						III	75%	91,500,000

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
		dan luar daerah				IV	100%	88,750,000
9	Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian	Bulan	12	259,840,000	I	25%	33,750,000
						II	50%	33,750,000
						III	75%	34,150,000
						IV	100%	33,350,000
10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor - AC - Printer - Laptop	Unit	8	54,540,000	I	100%	54,540,000
						II	-	-
						III	-	-
						IV	-	-
11	Pengadaan meubeleurn	Jumlah pengadaan meubeleurn : - Kursi kerja	Unit	50	20,000,000	I	100%	20,000,000
						II	-	-
						III	-	-
						IV	-	-
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala	Gedung	1	25,000,000	I	25%	6,250,000
						II	50%	6,250,000
						III	75%	6,250,000
						IV	100%	6,250,000
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Bulan	12	75,000,000	I	25%	18,750,000
						II	50%	18,750,000
						III	75%	18,750,000
						IV	100%	18,750,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Sekretaris

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

EDY RAKHMAN, S. Sos., M. Si.

Pangkat : Pembina
NIP. 19720308 199303 1 008

RUSMAWATI, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina
NIP.19681231 199003 2 027

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang disusun	Dokumen	2	4,925,000	I	30%	-
						II	65%	-
						III	100%	-
						IV	-	4,925,000
2	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	Dokumen	1	21,600,000	I	30%	3,600,000
						II	65%	9,900,000
						III	100%	6,600,000
						IV	-	1,500,000
3	Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	Dokumen	1	5,250,000	I	100%	-
						II	-	5,150,000
						III	-	-
						IV	-	100,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Sekretaris

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

EDY RAKHMAN, S. Sos., M. Si.

Pangkat : Pembina
NIP. 19720308 199303 1 008

ASRIANI, S.Psi., M.A.

Pangkat : Penata Muda Tingkat I
NIP. 19810720 201101 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBAGIAN KEUANGAN

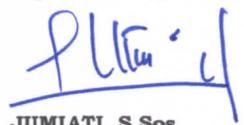
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	81,840,000	I	25%	4,250,000
						II	50%	4,250,000
						III	75%	3,000,000
						IV	100%	5,500,000
2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1	5,400,000	I	100%	-
						II	-	5,400,000
						III	-	-
						IV	-	-

Sengkang, 30 Januari 2019

Sekretaris

Kepala Subbagian Keuangan


EDY RAKHMAN, S. Sos., M. Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19720308 199303 1 008


JUMIATI, S.Sos.
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
NIP. 19681231 200701 2 124

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG PENGADAAN DAN INFORMASI ASN

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100
2	Penataan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)	Persentase ASN yang datanya akurat	%	100	I	99.71
					II	99.80
					III	99.90
					IV	100

Sengkang, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi ASN

H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19730514 199303 1 005

NURUL DHARMAYANTI, S.Kom., M.M
Pangkat : Pembina
NIP. 19810620 200502 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG PENGADAAN ASN DAN ARSIP KEPEGAWAIAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK	Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK	Aplikasi	2	314,400,000	I	25%	7,000,000
		Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian	Bulan	12		II	50%	37,000,000
		Jumlah ASN yang memperoleh Kartu Pegawai tepat waktu	Orang	70		III	75%	53,650,000
		Jumlah ASN yang memperoleh Kartu Suami/ Kartu Istri	Orang	200		IV	100%	216,750,000
2	Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN	Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN	Dokumen	1	75,880,000	I	25%	-
						II	50%	-
						III	75%	-
						IV	100%	75,880,000
3	Seleksi penerimaan CPNS	Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan CPNS	Orang	367	400,000,000	I	73%	95,990,000
						II	5%	-
						III	5%	255,000,000
						IV	17%	49,010,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi ASN



NURUL DHARMAYANTI, S.Kom., M.M
Pangkat : Pembina
NIP. 19810620 200502 2 004

Kepala Subbidang Pengadaan ASN dan Arsip Kepegawaian



MARWANA, S.E.
Pangkat : Penata
NIP. 19821011 200701 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ASN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Monitoring dan evaluasi penyelesaian LP2P	Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu	Orang	5246	53,000,000	I	25%	-
						II	50%	26,250,000
						III	75%	-
						IV	100%	26,750,000
3	Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN	Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu	Orang	394	56,060,000	I	100%	8,640,000
		Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu				86	II	-
						III	-	8,640,000
						IV	100%	25,140,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi ASN



NURUL DHARMAYANTI, S.Kom., M.M
Pangkat : Pembina
NIP. 19810620 200502 2 004

Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi ASN



NAJMIA, S. Sos.
Pangkat : Penata
NIP. 19850723 200502 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100
2	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi	%	85	I	85
					II	85
					III	85
					IV	85

Sengkang, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19730514 199303 1 005

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN

REZA EKA PRATAMA NASRUN, S.H
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. 19851101 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG MUTASI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	SK	600	55,407,500	I	25%	8,500,000
					-	II	50%	16,520,000
					-	III	75%	14,367,500
					-	IV	100%	16,020,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN



REZA EKA PRATAMA NASRUN, S.H
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. 19851101 200902 1 001

Kepala Subbidang Mutasi



RAHMAWATI, S.E.
Pangkat : Penata
NIP. 19820503 200701 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG KEPANGKATAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan formal	Orang	16	180,000,000	I	100%	170,000,000
						II	-	-
						III	-	-
						IV	-	10,000,000
2	Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	Orang	1600	268,190,000	I	25%	57,940,000
						II	50%	79,500,000
		Jumlah PNS yang menerima kenaikan gaji berkala tepat waktu		150		III	75%	58,782,500
						IV	100%	71,967,500
3	Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	Jumlah PNS yang lulus ujian dinas	Orang	5	29,400,000	I	50%	-
						II	100%	29,400,000
		Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah		50		III	-	-
						IV	-	-

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN

REZA EKA PRATAMA NASRUN, S.H

Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. 19851101 200902 1 001

Kepala Subbidang Kepangkatan

M. SUDARNA

Pangkat : Penata
NIP. 19730824 199703 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMOSI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pelantikan Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas	Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan Pejabat JPT, administrator dan pengawas	Kali	4	34,900,000	I	25%	4,500,000
						II	25%	9,700,000
						III	25%	7,200,000
						IV	25%	13,500,000
2	Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas	Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka JPT pratama, administrator dan pengawas	Kali	3	676,000,000	I	30%	36,240,000
						II	60%	51,240,000
						III	80%	272,140,000
						IV	100%	316,380,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN



REZA EKA PRATAMA NASRUN, S.H
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. 19851101 200902 1 001

Kepala Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi



MUHAMMAD HASYIM, S.E., S.Pd.
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
NIP. 19870503 201101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	%	100	I	25
					II	50
					III	75
					IV	100

Sengkang, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN

H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730514 199303 1 005

MAPPANYOMPA, S.Sos.
Pangkat : Pembina
NIP. 19740802 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI PROFESI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat Baik	Orang	120	1,319,675,000	I	50%	156,550,000
						II	100%	1,104,302,500
						III	-	23,310,000
						IV	-	35,512,500
2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim II dengan predikat Baik	Orang	4	121,044,000	I	25%	-
						II	50%	121,044,000
						III	75%	-
						IV	100%	-

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi ASN

MAPPANYOMPA, S.Sos.

Pangkat : Pembina

NIP. 19740802 199303 1 001

Kepala Bidang Diklat Penjenjangan
dan Sertifikasi Profesi



ANDI SRI WARDANA, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP. 19690616 200604 2 016

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	280,736,200	I	25%	-
						II	25%	197,000,000
						III	25%	83,736,200
						IV	25%	-
2	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi dengan predikat Baik	Orang	15	82,000,000	I	30%	-
						II	65%	-
						III	100%	82,000,000
						IV	-	-
3	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat Baik	Orang	22	244,500,000	I	30%	-
						II	65%	12,600,000
						III	100%	231,900,000
						IV	-	-
4	Pendampingan sistem manajemen mutu dan sistem anti penyruapan	Jumlah PNS yang memperoleh pendampingan sistem manajemen mutu dan sistem anti penyruapan	Orang	40	80,000,000	I	100%	-
						II	100%	-
						III	100%	-
						IV	100%	80,000,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi ASN

MAPPANYOMPA, S.Sos.

Pangkat : Pembina
NIP. 19740802 199303 1 001

Kepala Subbidang Teknis
dan Fungsional

NUR AFMI, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. 19690729 200604 2 012

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat.	Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat	Dokumen	2	126,260,000	I	50%	126,260,000
						II	100%	-
						III	75%	-
						IV	100%	-

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi ASN

MAPPANYOMPA, S.Ses.
Pangkat : Pembina
NIP. 19740802 199303 1 001

Kepala Subbidang Evaluasi dan
Pengembangan Kompetensi

SUKMIH, S.Sos
Pangkat : Penata
NIP. 19831220 200902 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BIDANG KINERJA, PEMBINAAN DAN FASILITASI PROFESI ASN

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100

Sengkang, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19730514 199303 1 005

Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN

Drs. MUHAMMAD BAKRI, S. Pd. M. Si.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19650807 198602 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR I

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS	Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja	Orang	6137	127,000,000	I	100%	5,760,000
						II	100%	5,760,000
						III	100%	52,760,000
						IV	100%	62,720,000

Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN

Drs. MUHAMMAD BAKRI, S. Pd. M. Si.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19650807 198602 1 008

Sengkang, 30 Januari 2019

Kelapa Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I

SUPRIADI, S.H.
Pangkat : Penata
NIP. 19810725 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR II

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Penyusunan sasaran kerja pegawai berbasis aplikasi e-kinerja	Jumlah ASN yang telah menyusun sasaran kerja pegawai berbasis e-kinerja tepat waktu	Orang	2988	30,000,000	I	100%	23,000,000
						II	-	-
						III	-	7,000,000
						IV	-	-
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran PNS	Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin	Orang	6137	12,200,000	I	100%	-
						II	100%	7,600,000
						III	100%	-
						IV	100%	4,600,000

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN

Drs. MUHAMMAD BAKRI, S. Pd. M. Si.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19650807/198602 1 008

Kelapa Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II

YENNI ERIA, S.Sos
Pangkat : Penata
NIP. 19830303 200502 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SUBBIDANG DISIPLIN, PEMBERHENTIAN, PENGHARGAAN DAN FASILITASI PROFESI ASN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		TARGET TRIWULAN		
				Fisik	Keuangan (Rp)	Triwulan	Fisik	Keuangan (Rp)
1	Pemberian Penghargaan dan Pelepasan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang menerima Kartu Peserta Taspen tepat waktu	Orang	267	227,965,000	I	25%	-
		Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu		170		II	50%	30,000,000
		Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun		179		III	75%	179,815,000
						IV	100%	18,150,000
2	Penyelenggaraan sidang majelis pertimbangan kepegawaian	Jumlah PNS yang menjalani sidang majelis pertimbangan kepegawaian	Orang	2	8,000,000	I	-	-
						II	50%	-
						III	-	-
						IV	100%	8,000,000
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan	Orang	700	59,208,000	I	30%	-
						II	75%	18,500,000
						III	100%	40,708,000
						IV	0%	-

Sengkang, 30 Januari 2019

Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN

Drs. MUHAMMAD BAKRI, S. Pd. M. Si.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19650807 198602 1 008

Kepala Subbidang Disiplin, Pemberhentian, Penghargaan dan Fasilitasi Profesi ASN

ALFIANY, S.Sos
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP.19740824 200003 2 004